

PERAN KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER DALAM MENJAGA STABILITAS EKONOMI

Silviani Rahman¹, Sudirman²

^{1,2}IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email: silvianirahman8881@gmail.com¹, yudihsudirman@gmail.com²

Abstrak

Kebijakan fiskal dan moneter memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dengan mengelola pengeluaran negara, perpajakan, jumlah uang beredar, dan suku bunga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interaksi kedua kebijakan tersebut dalam menghadapi tantangan ekonomi seperti inflasi, resesi, dan krisis global, termasuk pandemi COVID-19. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif, data sekunder dianalisis untuk mengidentifikasi sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara kedua kebijakan ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menjaga daya beli, serta memastikan stabilitas harga dan nilai tukar. Studi ini juga menyoroti pentingnya perencanaan yang tepat dan fleksibilitas kebijakan dalam merespons dinamika ekonomi. Dengan demikian, optimalisasi kebijakan fiskal dan moneter secara terkoordinasi merupakan kunci dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Kebijakan Fiskal, Kebijakan Moneter, Stabilitas Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi.

Abstract

Fiscal and monetary policies play an important role in maintaining economic stability by managing state spending, taxation, money supply, and interest rates. This study aims to analyze the interaction of the two policies in dealing with economic challenges such as inflation, recession, and global crises, including the COVID-19 pandemic. Through a qualitative-descriptive approach, secondary data are analyzed to identify synergies between fiscal and monetary policies. The results of the study show that coordination between the two policies can increase economic growth, maintain purchasing power, and ensure price and exchange rate stability. This study also highlights the importance of proper planning and policy flexibility in responding to economic dynamics. Thus, optimizing fiscal and monetary policies in a coordinated manner is key to creating sustainable development.

Keywords: Fiscal Policy, Monetary Policy, Economic Stability, Economic Growth.

PENDAHULUAN

Stabilitas ekonomi adalah kondisi di mana suatu perekonomian mampu mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan tanpa tekanan inflasi yang berlebihan atau risiko resesi yang signifikan (Priyanto dkk., 2024). Kebijakan fiskal dan moneter merupakan instrumen utama yang

digunakan oleh pemerintah dan otoritas moneter untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan fiskal mencakup pengelolaan anggaran negara melalui pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajak, sedangkan kebijakan moneter berfokus pada pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga (Putri, 2024).

Dalam beberapa dekade terakhir, berbagai negara telah menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks, seperti krisis keuangan global pada tahun 2008 dan dampak pandemi COVID-19 pada perekonomian dunia. Kondisi ini menunjukkan pentingnya peran kebijakan fiskal dan moneter yang efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi. Pandemi tersebut membawa tantangan unik seperti penurunan tajam dalam konsumsi dan investasi, serta gangguan pada rantai pasok global, sehingga mendorong pemerintah dan bank sentral di berbagai negara untuk menerapkan langkah-langkah kebijakan yang tidak konvensional (Jose & Putri, 2021).

Krisis ekonomi yang terkait dengan pandemi, misalnya, memerlukan kebijakan fiskal ekspansif yang signifikan untuk mendukung sektor kesehatan, memberikan bantuan sosial, dan menjaga daya beli masyarakat (Lativa, 2021). Di sisi lain, kebijakan moneter yang longgar diterapkan untuk menjaga likuiditas dan mencegah keruntuhan sistem keuangan (Rozeqqi & Asriati, 2024). Kombinasi langkah-langkah ini memberikan gambaran konkret tentang pentingnya koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter dalam merespons krisis ekonomi yang tidak terduga.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam merespons guncangan ekonomi. Misalnya, studi oleh (Lativa, 2021) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah yang tepat waktu dan terarah dapat mencegah resesi lebih lanjut. Sebagai contoh, stimulus ekonomi yang diterapkan selama pandemi COVID-19 berhasil meningkatkan konsumsi masyarakat dan menjaga permintaan agregat.

Sementara itu, kebijakan moneter juga memiliki peran yang signifikan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Menurut penelitian oleh (Septiani dkk., 2024), pengaturan suku bunga yang efektif oleh bank sentral dapat mencegah inflasi yang

tidak terkendali dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Selama krisis keuangan global 2008, pelonggaran kuantitatif yang dilakukan oleh Federal Reserve berhasil menstabilkan pasar keuangan.

Namun, kedua kebijakan ini tidak dapat bekerja secara terpisah. Kurangnya koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter dapat menyebabkan kebijakan yang kontraproduktif. Sebaliknya, sinergi antara keduanya dapat menghasilkan hasil yang lebih optimal (Chugunov dkk., 2021). Sebagai contoh, kombinasi antara stimulus fiskal dan penurunan suku bunga selama resesi global 2008 berhasil mencegah depresi ekonomi yang lebih dalam.

Kebijakan fiskal dan moneter juga memiliki keterbatasan. Kebijakan fiskal sering kali menghadapi tantangan politik dalam pelaksanaannya, seperti proses legislasi yang memakan waktu lama. Di sisi lain, kebijakan moneter memiliki keterbatasan dalam situasi suku bunga mendekati nol, seperti yang terlihat pada krisis 2008. Dengan demikian, koordinasi antara kedua kebijakan menjadi semakin penting.

Tantangan dalam menerapkan kebijakan fiskal dan moneter di negara berkembang lebih kompleks (Andariyani, 2024). Studi oleh (Rozeqqi & Asriati, 2024) menunjukkan bahwa volatilitas ekonomi yang tinggi di negara berkembang sering kali membuat kebijakan moneter sulit untuk diprediksi, sementara ruang fiskal yang terbatas membatasi efektivitas kebijakan fiskal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran kebijakan fiskal dan moneter dalam menjaga stabilitas ekonomi, serta mengidentifikasi sinergi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana kedua kebijakan tersebut dapat

dioptimalkan dalam konteks ekonomi yang dinamis

LITERATUR RIVIEW

Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter terdiri dari dua istilah, yaitu kebijakan dan fiskal atau moneter. Kebijakan (policy) didefinisikan sebagai program-program yang dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, berdasarkan nilai-nilai dan praktik-praktik yang terstruktur. Kebijakan juga dapat dipahami sebagai perilaku sejumlah pejabat atau kelompok dalam instansi pemerintah yang menentukan suatu arah dalam kegiatan tertentu. Selain itu, kebijakan merupakan keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk melaksanakan tindakan yang bertujuan mencapai hasil yang sesuai dengan kepentingan masyarakat (Handoko dkk., 2023).

1. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merujuk pada upaya pemerintah dalam mengelola ekonomi melalui instrumen seperti perpajakan, pengeluaran pemerintah, dan pinjaman. Tujuannya adalah untuk mencapai kondisi ekonomi yang stabil, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan fiskal memiliki berbagai fungsi, antara lain: meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, mengurangi kesenjangan sosial melalui redistribusi pendapatan, dan menjaga stabilitas makroekonomi.

Penelitian terkait kebijakan fiskal telah mengeksplorasi berbagai aspek penting. Salah satu fokus utama adalah pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. (Siswajanthi dkk., 2024b) menemukan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah pada sektor produktif, seperti infrastruktur dan pendidikan, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, pengeluaran yang tidak efisien berisiko menciptakan tekanan inflasi dan meningkatkan utang publik. (Ngathoillah

dkk., 2024) mengulas dampak perpajakan terhadap investasi dan konsumsi, menunjukkan bahwa perpajakan yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat dan menghambat investasi swasta. Dengan demikian, kebijakan fiskal dianggap memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas ekonomi, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada perencanaan dan implementasi yang tepat, serta konteks ekonomi masing-masing negara.

2. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah upaya bank sentral untuk mengelola perekonomian melalui pengendalian jumlah uang beredar, pengaturan suku bunga, dan intervensi nilai tukar. Tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga kestabilan harga, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memastikan keseimbangan neraca pembayaran.

Literatur terkait kebijakan moneter mencakup berbagai pendekatan dan alat yang digunakan oleh otoritas moneter. (Rozeqqi & Asriati, 2024) membahas efektivitas kebijakan moneter konvensional, seperti pengaturan suku bunga, dalam mengendalikan inflasi dan memacu pertumbuhan ekonomi. Mereka juga mencatat bahwa penurunan suku bunga secara signifikan dapat merangsang investasi dan konsumsi, tetapi kebijakan ini memiliki batasan, terutama ketika suku bunga mendekati nol. Penelitian terkait kebijakan moneter juga menyoroti pentingnya mekanisme transmisi kebijakan. Mekanisme ini menggambarkan bagaimana keputusan moneter, seperti perubahan suku bunga, memengaruhi sektor riil ekonomi. Studi menunjukkan bahwa efektivitas mekanisme ini dipengaruhi oleh struktur pasar keuangan, tingkat kepercayaan publik, dan kebijakan fiskal yang mendukung.

3. Interaksi Kebijakan Fiskal dan Moneter

Interaksi antara kebijakan fiskal dan moneter telah menjadi topik yang menarik perhatian para peneliti. Sinergi antara keduanya dianggap penting untuk mencapai stabilitas ekonomi. Ketika kebijakan fiskal dan moneter bekerja secara terkoordinasi, dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi cenderung lebih kuat. Sebagai contoh, peningkatan pengeluaran pemerintah yang didukung oleh kebijakan moneter akomodatif dapat meningkatkan daya beli masyarakat tanpa menciptakan tekanan inflasi yang berlebihan.

4. Stabilitas Ekonomi

Stabilitas ekonomi merujuk pada kondisi di mana indikator makroekonomi bergerak dalam arah yang menguntungkan dan tidak mengalami perubahan besar dari waktu ke waktu. Indikator ini meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan suku bunga. Dengan stabilitas ekonomi, tujuan makroekonomi lainnya, seperti harga yang stabil dan pertumbuhan yang berkelanjutan, dapat tercapai. Hal ini juga menciptakan iklim yang mendukung penciptaan lapangan kerja dan menjaga keseimbangan pembayaran. Stabilitas ekonomi sangat penting dalam pengambilan keputusan ekonomi, karena memudahkan pelaku bisnis untuk membuat prediksi terkait inflasi, yang sangat berguna untuk menentukan strategi seperti penetapan harga dan penyesuaian gaji. Sebaliknya, ketidakstabilan dapat menambah ketidakpastian, menghambat investasi, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan merusak standar hidup. Tantangan bagi pembuat kebijakan adalah untuk mengurangi ketidakstabilan tanpa mengurangi kemampuan ekonomi untuk meningkatkan standar hidup melalui peningkatan produktivitas, lapangan kerja, dan pertumbuhan berkelanjutan. Selain itu, stabilitas ekonomi dapat dipahami sebagai kondisi di mana tidak ada fluktuasi besar

dalam perekonomian makro. Ekonomi yang stabil berarti pertumbuhan output tetap, inflasi terkendali (tidak lebih dari 10%), dan tidak sering mengalami resesi. Stabilitas ekonomi juga mencerminkan perbaikan dalam perekonomian secara keseluruhan. Upaya menjaga stabilitas ekonomi makro dilakukan dengan langkah-langkah yang memperkuat daya tahan perekonomian domestik terhadap berbagai gejolak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri (Novalina, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai fenomena yang diteliti dengan menganalisis data yang ada secara deskriptif. Dalam hal ini, analisis data sekunder menjadi fokus utama, yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti laporan resmi pemerintah, jurnal ilmiah, serta data makroekonomi yang relevan dengan topik penelitian.

Langkah pertama adalah mengumpulkan data sekunder yang berhubungan dengan kebijakan fiskal dan moneter, termasuk peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas fiskal dan moneter, serta data ekonomi yang mencerminkan dampak dari kebijakan tersebut. Data yang digunakan mencakup statistik ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, dan indikator-indikator makroekonomi lainnya yang relevan dengan kebijakan fiskal dan moneter.

Selanjutnya, analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi pola-pola dalam penerapan kebijakan fiskal dan moneter serta hubungan antara kedua kebijakan tersebut. Hal ini mencakup penelusuran dampak dari kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga, serta bagaimana kebijakan moneter mempengaruhi inflasi dan likuiditas pasar. Dalam proses ini, data yang dikumpulkan akan dianalisis secara

kualitatif untuk melihat adanya kesesuaian atau ketidaksesuaian antara teori dan implementasi kebijakan yang ada.

Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam tentang hubungan antara kebijakan fiskal dan moneter, serta dampaknya terhadap perekonomian suatu negara, dengan fokus pada dinamika makroekonomi yang terjadi akibat perubahan kebijakan yang diterapkan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian negara melalui pengaturan pengeluaran negara dan penerimaan negara, terutama melalui sistem perpajakan (Zulaikah, 2025). Tujuan utama dari kebijakan fiskal adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi, mengatasi ketidakseimbangan dalam perekonomian, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Priyanto dkk., 2024). Kebijakan fiskal yang tepat dapat mendorong konsumsi, investasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sementara kebijakan yang tidak tepat dapat menyebabkan masalah ekonomi seperti inflasi yang tinggi atau defisit anggaran yang besar. Untuk mencapai tujuan ini, kebijakan fiskal melibatkan langkah-langkah seperti pengeluaran pemerintah, pemberian insentif pajak, dan reformasi perpajakan yang bertujuan untuk menciptakan efek positif di berbagai sektor penting dalam perekonomian (Mujasmara dkk., 2023).

Dalam menjalankan kebijakan fiskal, pemerintah menggunakan beberapa instrumen yang berfokus pada pengelolaan keuangan negara (Siswajanthi dkk., 2024a). Salah satu instrumen utama adalah pengeluaran untuk belanja publik, yang mencakup pengalokasian dana untuk berbagai sektor vital seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta program bantuan

sosial. Pengeluaran ini berfungsi untuk merangsang permintaan domestik, menciptakan lapangan pekerjaan, serta mendukung pembangunan sosial-ekonomi yang lebih merata. Selain pengeluaran publik, pemerintah juga memberikan insentif pajak, seperti pengurangan tarif pajak bagi perusahaan atau individu, guna mendorong investasi dan meningkatkan daya beli masyarakat. Insentif pajak ini bertujuan untuk merangsang kegiatan ekonomi, memperluas lapangan pekerjaan, dan meningkatkan konsumsi domestik (Mujasmara dkk., 2023).

Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan stimulus ekonomi untuk sektor-sektor yang membutuhkan dukungan lebih. Stimulus ini bisa berupa bantuan langsung tunai, subsidi, atau program bantuan lainnya yang ditujukan untuk mendukung sektor-sektor tertentu seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Program ini bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup sektor-sektor tersebut dan memperkuat perekonomian yang berbasis pada usaha lokal. Pemerintah juga melakukan reformasi perpajakan untuk memperbaiki sistem perpajakan yang ada, dengan tujuan memperluas basis pajak dan meningkatkan penerimaan negara secara lebih adil dan efisien. Reformasi ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu serta menciptakan sistem perpajakan yang lebih inklusif, yang mampu mendukung perekonomian secara keseluruhan.

2. Dampak Kebijakan Fiskal

Dampak kebijakan fiskal sangat berpengaruh pada berbagai sektor ekonomi, terutama pada sektor-sektor strategis yang menjadi pilar utama pembangunan nasional, seperti kesehatan, pendidikan, UMKM, dan infrastruktur. Dalam sektor kesehatan, kebijakan fiskal yang melibatkan peningkatan pengeluaran negara untuk sektor ini akan berfokus pada perbaikan fasilitas

kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan, dan penguatan sistem layanan kesehatan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi beban penyakit, serta memperkuat ketahanan sektor kesehatan dalam menghadapi tantangan kesehatan di masa depan (Carolina, 2022).

Pada sektor pendidikan, kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas akses pendidikan di seluruh wilayah. Pemerintah dapat meningkatkan anggaran untuk sektor pendidikan guna menyediakan fasilitas yang lebih baik, meningkatkan kesejahteraan pendidik, dan memastikan bahwa generasi muda memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Kebijakan fiskal yang mendukung sektor pendidikan akan berkontribusi pada terciptanya tenaga kerja yang lebih terampil dan siap bersaing dalam ekonomi global, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Carolina, 2022).

UMKM, sebagai salah satu sektor vital dalam perekonomian Indonesia, juga mendapatkan manfaat dari kebijakan fiskal. Melalui insentif pajak, subsidi, dan program bantuan, pemerintah dapat memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh UMKM untuk bertumbuh, meningkatkan daya saing, serta memperkuat ketahanan ekonomi. Kebijakan fiskal yang mendukung UMKM akan menciptakan lapangan pekerjaan baru, memperkuat sektor ekonomi domestik, dan berperan dalam mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah (Mightyn dkk., 2022).

Di sektor infrastruktur, kebijakan fiskal yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian. Investasi dalam infrastruktur tidak hanya merangsang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan konektivitas antar wilayah, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta menciptakan banyak lapangan

pekerjaan baru. Infrastruktur yang baik akan mendukung efisiensi ekonomi, memperkuat daya saing nasional, dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh daerah. Dengan demikian, kebijakan fiskal yang mendukung sektor-sektor strategis ini akan memberikan dampak positif yang luas terhadap kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional (Lubis, 2024).

3. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah upaya yang dilakukan oleh otoritas moneter, dalam hal ini Bank Indonesia (BI), untuk mengatur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian serta menentukan tingkat suku bunga. Tujuan utama kebijakan moneter adalah untuk menjaga stabilitas harga (inflasi), mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Dengan mengatur uang yang beredar, BI berusaha untuk mencapai kestabilan ekonomi yang optimal, dimana inflasi terkendali dan nilai tukar stabil, sambil mendukung pertumbuhan ekonomi (Irawan, 2023).

Kebijakan moneter dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan yang diterapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, biasanya dilakukan dengan menurunkan suku bunga dan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini bertujuan untuk merangsang konsumsi dan investasi. Sedangkan kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan yang diterapkan untuk mengendalikan inflasi, biasanya dilakukan dengan menaikkan suku bunga dan mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini bertujuan untuk menekan konsumsi dan investasi demi menstabilkan harga (Masrufah, 2022).

Bank Indonesia memiliki peran sentral dalam menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan moneter. Sebagai otoritas moneter negara, BI

bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai rupiah dan sistem keuangan Indonesia. Sebelum krisis moneter Asia pada tahun 1997, Indonesia menerapkan kebijakan moneter yang cenderung longgar. Bank Indonesia, sebagai bank sentral negara, lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi daripada menjaga stabilitas harga. Saat krisis moneter melanda Asia pada tahun 1997, Indonesia menjadi salah satu negara yang paling terdampak. Bank Indonesia terpaksa mengubah kebijakan moneternya secara drastis untuk mengatasi gejala ekonomi yang terjadi. Upaya stabilisasi mata uang rupiah dilakukan melalui intervensi pasar valuta asing dan peningkatan suku bunga acuan secara signifikan. Setelah krisis 1997, Indonesia melakukan reformasi sistem keuangan dan moneter untuk memperbaiki ketahanan ekonominya. Bank Indonesia mulai menerapkan kebijakan inflasi targeting dengan fokus utama pada stabilitas harga. Kebijakan kuantitatif juga pernah digunakan di Indonesia dalam kebijakan moneter. Untuk menstabilkan pasar keuangan dan meningkatkan likuiditas sistem perbankan. Pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi adalah tujuan dari kebijakan ini. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, bank Indonesia dapat intervensi di pasar valuta asing jika diperlukan. Cadangan devisa yang besar juga memainkan peran penting dalam menjaga ketahanan negara terhadap ancaman internasional. Sejak krisis moneter 1997, kebijakan moneter Indonesia telah mengalami perubahan besar. Fokus dari pertumbuhan ekonomi menuju stabilitas harga dan peningkatan ketahanan ekonomi melalui instrumen kebijakan kuantitatif dan pengaturan nilai tukar dan devisa (Hasanah dkk., 2024).

4. Dampak Kebijakan Moneter

Dampak kebijakan moneter sangat signifikan terhadap berbagai aspek perekonomian, termasuk konsumsi, investasi, inflasi, dan nilai tukar. Penurunan suku bunga

cenderung mendorong konsumsi karena biaya pinjaman menjadi lebih murah, sehingga rumah tangga lebih mudah untuk berbelanja dan memenuhi kebutuhan mereka. Sebaliknya, ketika suku bunga dinaikkan, konsumsi akan terhambat karena biaya pinjaman yang lebih tinggi, yang mengurangi daya beli masyarakat dan menekan pengeluaran rumah tangga (Zulaikah, 2025).

Di sisi investasi, kebijakan moneter yang lebih ekspansif, dengan suku bunga rendah dan likuiditas tinggi, dapat mendorong peningkatan investasi karena biaya modal menjadi lebih murah bagi perusahaan dan individu yang ingin berinvestasi. Sebaliknya, suku bunga yang tinggi cenderung menurunkan tingkat investasi, karena biaya pembiayaan yang lebih mahal membuat banyak pihak enggan untuk melakukan ekspansi atau berinvestasi (Hasanah dkk., 2024).

Kebijakan moneter juga memiliki dampak langsung terhadap inflasi. Kebijakan ekspansif, yang meningkatkan jumlah uang yang beredar, dapat meningkatkan risiko inflasi jika pasokan uang tidak sebanding dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia. Sebaliknya, kebijakan kontraktif bertujuan untuk mengendalikan inflasi dengan mengurangi jumlah uang yang beredar, sehingga menurunkan tekanan terhadap harga barang dan jasa (Permana & Setiawan, 2022).

Terakhir, kebijakan moneter juga mempengaruhi nilai tukar rupiah. Suku bunga yang lebih tinggi dapat menarik investasi asing, yang memperkuat nilai tukar rupiah karena permintaan terhadap mata uang Indonesia meningkat. Sebaliknya, suku bunga yang lebih rendah dapat melemahkan nilai tukar rupiah jika investor mencari imbal hasil yang lebih tinggi di pasar lain, yang menyebabkan arus keluar modal dan menekan nilai tukar (Jumiati, 2022).

5. Hubungan Kebijakan Fiskal dan Moneter

Kebijakan fiskal dan moneter memiliki hubungan yang erat dalam mencapai tujuan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan berkelanjutan. Kedua kebijakan ini saling melengkapi, dengan masing-masing berfokus pada aspek yang berbeda namun tetap mendukung tujuan yang sama. Koordinasi yang baik antara kebijakan fiskal dan moneter dapat menciptakan kondisi ekonomi yang stabil, mengurangi volatilitas, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hakiki dkk., 2024).

Kebijakan fiskal yang mengandalkan pengeluaran negara dan perpajakan bertujuan untuk merangsang kegiatan ekonomi, meningkatkan konsumsi, dan mendukung sektor-sektor penting seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Namun, kebijakan fiskal yang ekspansif seperti peningkatan belanja publik atau pengurangan pajak dapat menambah tekanan inflasi dan meningkatkan defisit anggaran. Di sinilah kebijakan moneter berperan untuk menjaga stabilitas harga dan sistem keuangan dengan mengatur jumlah uang yang beredar dan suku bunga. Misalnya, jika pemerintah melaksanakan stimulus fiskal dengan meningkatkan belanja publik untuk mendorong konsumsi, Bank Indonesia (BI) dapat merespons dengan kebijakan moneter ekspansif, seperti menurunkan suku bunga, untuk mendorong lebih banyak investasi dan konsumsi, serta mengatasi potensi penurunan ekonomi (Raysharie dkk., 2024).

Koordinasi yang baik antara kebijakan fiskal dan moneter juga sangat penting dalam menghadapi guncangan eksternal atau krisis ekonomi global. Misalnya, jika terjadi krisis keuangan global yang mempengaruhi daya beli masyarakat dan perusahaan, kebijakan fiskal dapat membantu dengan meningkatkan belanja negara untuk merangsang konsumsi domestik dan menciptakan lapangan kerja. Sementara itu, Bank Indonesia mungkin akan menurunkan suku bunga untuk mendukung

pinjaman dan investasi, serta memastikan likuiditas tetap tersedia di pasar. Kedua kebijakan ini bekerja bersama untuk meminimalkan dampak dari krisis dan mempercepat pemulihan ekonomi.

Namun, tantangan muncul ketika kebijakan fiskal dan moneter tidak selaras. Misalnya, ketika kebijakan fiskal yang ekspansif mendorong pengeluaran yang lebih tinggi sementara kebijakan moneter yang ketat diterapkan untuk mengendalikan inflasi, ini dapat menciptakan ketegangan. Pemerintah dan Bank Indonesia perlu berkomunikasi dengan baik dan memahami tujuan masing-masing kebijakan, dengan tujuan utama untuk menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang. Dalam situasi ini, kebijakan moneter yang fleksibel dan responsif terhadap kondisi ekonomi bisa mendukung dampak positif dari kebijakan fiskal, mengurangi dampak inflasi yang mungkin timbul.

Stabilitas ekonomi tidak hanya bergantung pada kebijakan fiskal atau moneter secara individu, tetapi pada bagaimana kedua kebijakan ini saling melengkapi dan bekerja sama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Diperlukan pemahaman yang mendalam tentang dinamika ekonomi yang terus berubah agar kebijakan fiskal dan moneter dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi dalam menjaga stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Kebijakan fiskal dan moneter merupakan dua instrumen utama dalam mengelola perekonomian yang memiliki tujuan serupa, yaitu menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan fiskal, melalui pengelolaan pengeluaran dan penerimaan negara, berperan

dalam mendukung sektor-sektor strategis seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan UMKM. Sementara itu, kebijakan moneter, melalui pengaturan jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga, berfokus pada pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar, dan likuiditas sistem keuangan. Koordinasi yang efektif antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan ekonomi dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan memanfaatkan keunggulan masing-masing, kedua kebijakan ini dapat menciptakan sinergi yang optimal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kestabilan makroekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Andariyani, I. M. (2024). Dampak Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Analisis Perbandingan Antara Negara Berkembang Dan Negara Maju. *Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial Dan Ekonomi*, 1(2), 49–54.
- Carolina, M. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Subsidi, Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan. *Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 7–1.
- Chugunov, I., Pasichnyi, M., Koroviy, V., Kaneva, T., & Nikitishin, A. (2021). Fiscal And Monetary Policy Of Economic Development. *European Journal Of Sustainable Development*, 10(1), 42–52.
- Hakiki, A., Suhaemi, B., Mua'mmar, M. N., & Kurniasari, D. (2024). Analisis Kebijakan Moneter, Fiskal Dan Inflasi Pada Pertumbuhan Ekonomi. *Prestise: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 41–63.
- Handoko, D. O., Putra, P. A., Ismail, R., & Soemitra, A. (2023). Bauran Kebijakan Fiskal Dan Moneter Terhadap Perekonomian Dalam Perspektif Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance*, 6(1), 12–20.
- Hasanah, M., Astuti, R. P., & Ambarwati, I. (2024). Kebijakan Moneter Di Indonesia. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(5), 49–54.
- Irawan, E. (2023). Peran Kebijakan Moneter Dalam Perekonomian: Suatu Kajian Literatur. *Cemerlang: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 3(4), 258–265.
- Jose, H. S., & Putri, I. P. E. (2021). Tatanan Global Pada Pembangunan Dan Ekonomi Politik Internasional Selama Dan Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa*, 5(1), 46–70.
- Jumiati, E. (2022). Kebijakan Moneter Sebagai Pengendali Inflasi Dan Nilai Tukar (Peran Bank Sentral). *Azmina: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 1–14.
- Lativa, S. (2021). Analisis Kebijakan Fiskal Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan perekonomian. *Jurnal Ekonomi*, 23(3), 161–175.
- Lubis, R. P. (2024). Kebijakan Fiskal Dan Moneter. *Serasi Media Teknologi*.
- Masrufah, L. (2022). Kebijakan Moneter Dan Fiskal Dalam Perekonomian: Pengertian, Jenis, Intrumen, Contoh Dari Kebijakan Moneter Dan Fiskal. *Kasbana: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 38–55.
- Mightyn, A., Nugroho, L., & Hidayah, N. (2022). Kajian Usaha Pemerintah Dalam Mempertahankan Keberlangsungan Umkm Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(4), 1553–1564.
- Mujasmara, F. D., Panggabean, R. T. T., Muliana, R. S., Nugrahadi, E. W., & Rinaldi, M. (2023). Peran Kebijakan Fiskal Terhadap Perekonomian Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 2986–2997.
- Ngathoillah, A. I., Ardhika, Y., Masyhur, A. M., & Maura, Z. N. (2024). Ekonomi Makro. *Musyteri: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 11(4), 51–60.
- Novalina, A. (2021). Efektivitas Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam

Pengendalian Stabilitas Ekonomi Di Six Emerging Market Asia Tenggara. Publish Buku Unpri Press Isbn, 1(1).

Permana, Y. H., & Setiawan, S. (2022). Peran Bank Indonesia Dalam Menstabilkan Perekonomian Dan Jumlah Uang Beredar Melalui Kebijakan Moneter. *Jurnal Dimamu*, 1(2).

Priyanto, I. M., Firdausi, L., & Ayuningtyas, N. (2024). Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Mengurangi Pengangguran. *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 10(8), 81–90.

Putri, Melisa. (2024). Kebijakan Moneter Dan Fiskal: Studi Kasus Pada Krisis Ekonomi Global. *Circle Archive* 1.5.

Raysharie, P. I., Alviandi, R., Marbun, E. T. N., & Sirait, L. R. A. (2024). Pengaruh Kebijakan Fiskal Dan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Kasus Studi Dalam Konteks Ekonomi Makr. *Research Accounting And Auditing Journal*, 1(2), 21–32.

Rozeqqi, I., & Asriati, N. (2024). Peran Bank Sentral Dalam Mengendalikan Inflasi: Pengalaman Negara Maju Dan Berkembang. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 4(2), 571–582.

Septiani, S., Rahmawati, T., Oktariani, V. D., Evi, E., & Fadilla, A. (2024). Peran Kebijakan Moneter Di Indonesia Dalam Menghadapi Inflasi. *Journal Of Economics, Assets, And Evaluation*, 1(3), 1–7.

Siswajanthi, F., Shiva, K. A., Salsabila, N., Putry, S. A. S., & Putri, S. M. (2024a). Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 4360–4369.

Siswajanthi, F., Shiva, K. A., Salsabila, N., Putry, S. A. S., & Putri, S. M. I. (2024b). Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 4360–4369.

Zulaikah, Z. (2025). Peran Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Makro. *Journal Of Mandalika Literature*, 6(1), 95–108.